



Seni Rupa Kontemporer dan Publik

Oleh **Asmudjo J Irianto***

KENYATAAN menunjukkan, bahwa seni rupa kontemporer kerap menampilkan beragam persoalan dalam masyarakat. Khususnya di Indonesia, representasi seni rupa kontemporer pekat berkaitan dengan kondisi sosial-politik, suatu hal yang sangat bisa diterima mengingat kondisi sosial-politik, dan ekonomi yang kacau balau beberapa tahun terakhir ini sangat kental dirasakan oleh masyarakat. Tidak bisa dihindari bahwa karya-karya yang pekat dengan pesan dan makna sosial-politik berisiko untuk diletakkan dan disikapi secara 'politik' oleh pihak lain, terutama kelompok yang tersenggol atau tidak sepekat dengan pesan atau penampilan karya. Sering kali alasan pelarangan atau penysoran mengatasnamakan kepentingan publik, dengan alasan demi stabilitas dan menjaga nilai-nilai moral.

Kita masih ingat, bagaimana di masa Orde Baru banyak pergelaran seni yang ditutup dan dilarangan oleh penguasa. Sebagai akibatnya, wacana yang terbawa dan dihasilkan kerap meninggalkan kerangka estetis. Dalam hal ini, bukannya perbincangan pada kualitas seni atau estetis tidak dapat dilakukan, tetapi tidak menjadi prioritas. Salah satu contoh paling aktual adalah apa yang terjadi dengan pameran Dadang Christanto di Bentara Budaya Jakarta (BBJ) beberapa hari silam. Karya instalasi patung Dadang Christanto berjudul *They Give Evidence*, harus menghilang dari halaman BBJ karena desakan sekelompok warga sekitar Bentara Budaya, dengan alasan por-

nografi. Keberatan warga dipicu oleh figur telanjang dari 14 patung yang menggambarkan sosok lelaki dan perempuan. Bagi pihak yang masih memiliki kepekaan visual, tentu bersepakat bahwa patung-patung tersebut, jauh dari membangkitkan hasrat seksual. Ketelanjangan tersebut lebih membangkitkan rasa trenyuh. Kompromi yang dilakukan pada saat pembukaan dengan membajui patung-patung tersebut, tentu sedikit banyak menghilangkan esensi pesan yang hendak disampaikan oleh seniman, karena itu barangkali sang seniman dan kurator pameran tersebut 'menerima', ketika akhirnya instalasi patung tersebut 'digudangkan' oleh pihak penyelenggara dan kehadirannya digantikan oleh sang seniman dengan nisan hitam.

Pembajuan dan kemunculan 'karya' baru berupa batu nisan hitam menjadi suatu hal yang menarik. Keduanya bisa menjadi representasi dari posisi, kemungkinan dan risiko seni rupa kontemporer dalam masyarakat. Relasi antara praktik seni rupa kontemporer dan masyarakat memang menyisakan pertanyaan, sejauh mana kepentingan relasi tersebut? Apakah seni rupa kontemporer hadir karena dibutuhkan oleh masyarakat? Atau seniman dan para pendukungnya yang meniscayakan hal itu. Seni rupa kontemporer walau kerap bicara persoalan masyarakat, tetapi aksesnya terhadap masyarakat luas sangat terbatas, terlebih di Indonesia. Pengertian akses di sini, tidak hanya menyangkut pengertian fisik, tetapi juga latar-pemahaman dan referensi masyarakat terhadap pengertian dan praktik seni rupa kontemporer, dan itu tentu berhubungan dengan tingkat kebutuhan ma-

sarakat terhadap seni rupa kontemporer.

Infrastruktur seni rupa yang amat minim tentu memberikan masalah pada mediasi dan presentasi seni pada publik, sehingga pemahaman publik terhadap praktik seni rupa kontemporer hampir tidak terbentuk. Di negara-negara Barat yang infrastrukturnya sudah maju pun edukasi publik terus dilakukan. Museum-museum seni rupa besar di Barat selain mendukung kurator dan seniman dalam memproduksi wacana dan praksis dalam taran akademis juga melaksanakan program-program yang disebut *public education* untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat umum dalam memahami seni rupa kontemporer. Begitu pun sikap anti dan sinis terhadap seni rupa kontemporer tetap muncul di Barat, hal ini tidak lepas dari penggunaan nilai ukur dari luar seni rupa, seperti parameter kegunaan langsung, moralitas puritan, dan dogma agama. Di negara embahnya demokrasi, karya-karya foto Robert Mapplethorpe yang menampilkan berbagai pose pria telanjang menimbulkan reaksi keras Kongres Amerika, memunculkan suar-suara yang ingin adanya penysoran bagi seni rupa kontemporer, dan dievaluasinya kembali sokongan negara (*endowment*) untuk seni. Sikap keras terhadap ketelanjangan tersebut lebih dipicu oleh kenyataan bahwa sang seniman menampilkan sisi-sisi homoseksualitas yang juga bagian dari dirinya. Tidak jarang sikap sinis dan puritan tersebut juga datang dari wilayah seni rupa sendiri. Misalnya reaksi keras publik seni Amerika terhadap pameran Whitney Biennial tahun 1993, yang kental menyajikan dan mempertanyakan persoalan

ras dan gender.

Pluralitas sudut pandang

Pluralitas dan kompleksitas seni rupa kontemporer pada akhirnya juga menawarkan pluralitas pendekatan dan sudut pandang, yang terkadang bertentangan satu sama lain. Hal tersebut kerap menimbulkan pertengkaran dalam medan sosial seni rupa, karena perbedaan keyakinan dan sudut pandang. Sesungguhnya hal itu bisa menjadi polemik yang sehat, sayangnya di Indonesia hal itu lebih kerap menjadi debat kusir.

Agar seni rupa kontemporer bisa menjalankan perannya, dibutuhkan kerelaan masyarakat untuk menempatkan dan memberikan 'hak khusus' (*privilege*) pada seni rupa kontemporer, sebagai wilayah spesifik dengan potensi kritis terhadap beragam aspek persoalan budaya. Untuk menampilkan daya kritisnya seni rupa kontemporer kerap tampil semaunya dan tanpa aturan, hal itu sebagai konsekuensi merepresentasikan keburukan, kemunafikan, dan kekerasan yang ada dalam masyarakat. Seniman kontemporer kerap menjadi martir dengan menekan atau mengabaikan rasa malu mereka sendiri. Misalnya, ketelanjangan yang kerap muncul dalam sajian *performance art* yang barangkali menyerang hipokrisi dalam masyarakat. Maka, sungguh muskil memberikan penilaian terhadap seni rupa kontemporer, dengan parameter moralitas puritan atau wilayah dogmatis, akibatnya yang terjadi adalah kebutuhan komunikasi.

Seni rupa kontemporer menjadi bernas jika disikapi dan diapresiasi dengan 'tepat' oleh publik, dalam hal ini, sayangnya perangkat yang tersedia bagi masyarakat masih minim. Dalam



■ *They Give Evidence* karya Dadang Christanto
Menimbulkan gejolak publik

kompleksitas seni rupa kontemporer, mudah diduga bahwa risiko seni rupa kontemporer untuk disalah mengerti oleh masyarakat menjadi kemungkinan besar. Tetapi penolakan dan sensor terhadap karya-karya Dadang Christanto oleh sekelompok masyarakat menjadi ironis mengingat Dadang mudah dilihat sebagai seniman yang berdiri di pihak kaum tertindas-dalam hal ini sering kali adalah masyarakat kebanyakan. Alasan pornografi, menjadi antiklimaks yang tidak menarik dan sepele, karena hal itu sama sekali di luar intensi sang seniman, apalagi mengi-

ngat permasalahan pornografi yang sesungguhnya mungkin tidak tersentuh oleh protes masyarakat tersebut.

Sesungguhnya karya-karya Dadang tidak sulit untuk diapresiasi dan dipahami, sebab karya-karya Dadang tidak menghadirkan atau merepresentasikan kompleksitas budaya kontemporer, tetapi menampilkan sejarah hitam yang selama ini tersembunyi. Dalam hal ini Dadang adalah seniman yang piawai menyusun gubahan visual, sehingga 'kengerian' dan 'kekerasan' yang pernah terjadi bisa dihadirkan kembali dengan bahasa estetis yang

sublim dan mengajak kita untuk merenung kembali perjalanan sejarah hitam yang telah kita lalui. Hal itu muncul dari totalitas sang seniman dalam menggarap karyanya, yang barangkali juga didorong oleh kenyataan bahwa dia merupakan pihak yang pernah merasakan akibat dari kezaliman permainan politik. Karya-karya Dadang jauh dari sekadar propaganda politik, karena nuansa dan kekuatan estetiknya. Itulah yang diberikan oleh Nirwan Dewanto kiranya cukup tepat karya-karya tersebut adalah Pusi Politik.

*Perupa tinggal di Bandung